

### Graphical abstract



### IMPLEMENRASI PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN MASYARKAT DESA PIRIANG TAPIKO KECAMATAN TUTAR KABUPATEN POLEWALI MANDAR

<sup>1</sup>\*Ongki Bahtiar, <sup>2</sup>\*Mukhlis Hannan<sup>3</sup>\*Abd, Asis  
<sup>1</sup>Universitas Al-Asyariah Mandar

\*Corresponding author  
[Ongkibahtiar012@gmail.com](mailto:Ongkibahtiar012@gmail.com)

### Abstract

In realizing development goals, all potential from nature must be explored, developed and utilized as well as human potential in the form of a large population, knowledge and skills must be increased so that they are able to explore, develop and make maximum use of natural potential and implement development programs. achieved. The research method used is descriptive research, namely a research method that aims to provide a systematic, factual and accurate description of existing data in the field regarding community participation in the development planning process in Piriang Tapiko Village, Tutar District, Polewali Mandar Regency. The approach taken is a qualitative approach, namely a method that uses simple methods, namely conducting observations and direct interviews with informants on the principle that the development carried out by the Piriang Tapiko Village community is only for the village community itself in meeting the needs of the village community's life. Thus, in the village participation process itself, it is used for the general public or more specifically the Piriang Tapiko village community itself.

**Keywords:** *Implementation of participatory planning, community development*

### Abstrak

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan maka segenap potensi dari alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baik begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dari keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Metode peneliti yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa piriang tapiko kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yaitu metode yang menggunakan simpel, yakni melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan pada prinsip pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Piriang Tapiko hanyalah untuk masyarakat desa itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa. Dengan demikian maka dalam proses proses partisipasi desa itu sendiri yang dipergunakan untuk masyarakat umum atau lebih khususnya masyarakat desa Piriang Tapiko itu sendiri.

**Kata kunci:** *Implementasi perencanaan partisipatif, pembangunan masyarakat*

### Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v5i1.3570>

Received : 12 Agustus 2022 | Received in revised form : 19 Oktober 2022 | Accepted : 24 Mei 2023

## 1. PENDAHULUAN

Selain itu, diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlandaskan pada konsep pengakuan (recognition of origin rights) dan subdarity (penetapan kewenangan skala lokal dan pengambilan keputusan lokal untuk kepentingan masyarakat). . Sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Pasal 1 Huruf C, masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat secara bertanggung jawab mengenai kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan..

Menurut penelitian Hendryk (2013), “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Sugai Keledeng, Kecamatan Samalow Seberang Kota Samarinda,” sudah banyak kegiatan pelibatan masyarakat dalam pembangunan fisik. Hal ini terlihat dari luasnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Perbedaan utama adalah bahwa penelitian ini lebih menekankan pada tahap perencanaan pembangunan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, penelitian Arianto (2011) tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Pulo Dongon, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, menyimpulkan bahwa dengan partisipasi warga, ada penekanan pada partisipasi langsung. dalam pengambilan keputusan di lembaga dan proses pemerintah. Warga Pulo Dongom, Kecamatan Kuala Hulu, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara telah memberikan kontribusi, mengubah gagasan partisipasi dari sekedar memperhatikan masyarakat kurang mampu.

“Implementasi Proses Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo” oleh Hakim Abdul, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar angkatan 2014. Penelitian ini berusaha untuk memastikan: 1. Proses perencanaan partisipasi desa Leppangeng; 2. Faktor-faktor Kabupaten Belawa dan Kabupaten Wajo yang Mempengaruhi Proses Perencanaan Partisipatif Desa Leppangeng Penelitian semacam ini bersifat kualitatif. Kami menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data kami. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, data diperiksa. Temuan mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Leppangeng sudah terlibat dalam proses perencanaan partisipatif pada tahap penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, dan perumusan tujuan, masyarakat tidak dilibatkan pada tahap penetapan langkah dan perancangan khusus. anggaran. Mukhlis Hannan (2017) dosen universitas al asyariah mandar jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan universitas AI asyariah mandar

yang berjudul “Analisis Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif di kabupaten polewali mandar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimana implementasi perencanaan partisipatif dalam mewujudkan pembangunan daerah dan mengetahui bagaimana kelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif

Hj. Sitti Nur Fatimah perencanaan pembangunan di Desa Dolok Merawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan kunci sebanyak 7 responden dan informan tambahan sebanyak 20 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif sudah dipahami oleh masyarakat Desa Dolok Merawan. (2016).” Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti di kecamatan Tinggimoncong dan melakukan wawancara dengan beberapa informan, digunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Memanfaatkan tiga faktor—mengumpulkan informasi tentang isu-isu pembangunan, mengarahkan aspirasi masyarakat, dan diversifikasi pengambilan keputusan—penelitian perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, telah menghasilkan hasil yang diketahui. Kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dalam memberikan rekomendasi dan kritik pembangunan dianggap sebagai kumpulan informasi kesulitan pembangunan.

Salah satu desa di Kecamatan Tutar Kecamatan Polewali Mandar yang telah menerapkan pendekatan mekanisme perencanaan pembangunan top-down dan bottom-up adalah Desa Piriang Tapiko. Dimulai dengan perencanaan top-down pada tahun 2014, masyarakat hanya diperlakukan sebagai objek dalam pembangunan dan belum dijadikan subjek dalam proses pembangunan, dengan kewenangan pemerintah desa hanya mencakup lingkup desa. Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap rencana pembangunan dari tingkat tertinggi pemerintah pusat hingga tingkat terendah yaitu desa harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sedangkan Bab 1 Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan Desa Piriang Tapiko telah mengusulkan Perencanaan Pembangunan dengan menggunakan metodologi Bottom-up. Proses ini akan dimulai dengan identifikasi masalah dan potensi solusi dengan memaksimalkan masukan dari masyarakat, dilanjutkan dengan anggaran oleh Kepala Desa dan BPD, implementasi (padat karya) melalui penambahan sumber tenaga untuk proses pengembangan kependudukan setempat, dan terakhir, Setelah pelaksanaan mekanisme perencanaan tersebut di atas, terlihat adanya dampak negatif yang signifikan

terhadap masyarakat, sebagaimana dibuktikan oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang memungkinkan proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan diikuti oleh masyarakat luas. Pada titik ini, jumlah pihak yang bertikai dalam proses konstruksi juga meningkat. Judul artikel ini adalah "Implementasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa Piriang Tapiko Kecamatan Tutar Kabupaten Polowali Mandar", berdasarkan peta di atas.

## 2. METODE PENELITIAN

Dianalisis melalui penelitian deskriptif, yang melibatkan pengumpulan informasi melalui wawancara atau makalah, pengolahan informasi, dan kemudian menyajikan data pengamatan sehingga pihak lain dapat dengan cepat dan mudah mendapatkan gambaran tentang subjek penelitian dalam bahasa yang sopan.

Tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai betapapun baiknya suatu kebijakan jika tidak disiapkan dan direncanakan secara efektif untuk implementasinya, klaim Teori Implementasi Kebijakan George Edward III (George Edward III, 1980:1). Tujuan kebijakan tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, desain dan pelaksanaan kebijakan harus dipikirkan dan direncanakan secara matang untuk memenuhi tujuan kebijakan. Penilaian Implementasi Menurut Edward, komunikasi, sumber daya, karakter atau sikap, dan struktur birokrasi merupakan empat elemen terpenting dalam implementasi. Variabel-variabel ini semua berfungsi secara bersamaan dan berinteraksi satu sama lain.

### 1. Komunikasi

Merupakan ukuran sejauh mana kebijakan dalam bentuk peraturan telah tersampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

Komunikasi berfungsi sebagai tolak untuk beberapa kebijakan berupa undang-undang tertentu yang telah dijelaskan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan mekanisme penegakan undang-undang tersebut. Menurut Edward III, tiga pertimbangan terpenting dalam proses komunikasi kebijakan adalah transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).

### 2. sumber daya

Terlepas dari seberapa cermat, konsisten, dan eksplisit arahan implementasi disampaikan, jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, implementasi pasti akan gagal. berikut adalah sumber penting:

#### a. Kecukupan dan kualifikasi

Sumber daya manusia yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan bila tersedia dalam jumlah yang cukup dan memenuhi syarat untuk

melakukannya. Pelaksana yang jumlahnya cukup dan memiliki bakat dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan yang ditentukan ditunjukkan dengan sumber daya manusia yang memiliki jumlah dan kualifikasi yang memadai. Banyak pelaksana mungkin tidak selalu menjamin keberhasilan implementasi jika mereka tidak memiliki kemampuan yang diperlukan. Namun, kekurangan staf yang berkualitas juga akan menghambat penerapan kebijakan ini:

#### b. Kewenangan

Kemampuan sumber daya manusia untuk menjalankan kebijakan tertentu disebut sebagai otoritas dalam sumber daya. Kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya manusia merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap pelaksana untuk menjalankan syarat-syarat suatu kebijakan.

#### c. Informasi

Informasi merupakan sumber penting untuk mengimplementasikan kebijakan. Informasi dalam sumber daya adalah data yang dimiliki dan digunakan oleh sumber daya manusia untuk menjalankan aturan yang telah ditentukan. Di sini, informasi untuk melaksanakan kebijakan mengacu pada semua instruksi, pedoman, dan proses implementasi tertulis atau lisan yang dimaksudkan untuk menjalankan kebijakan.

#### d. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan

#### 1. Disposisi

Sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan disebut sebagai disposisi mereka. Sikap pelaksana merupakan faktor yang berdampak pada bagaimana kebijakan diimplementasikan. Menurut (Winarno, 2004: 142), proses implementasi suatu kebijakan menjadi lebih menantang jika para pelaksana berperilaku baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti ada dukungan. Sebaliknya, jika perilaku atau cara pandang pelaksana berbeda dengan pengambil keputusan, maka proses implementasi suatu kebijakan menjadi lebih sulit.

Sikap para pelaksana dalam suatu kesediaan dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Namun, hal itu tidak akan terjadi jika sikap para pelaksana kebijakan tidak disiapkan. Demikian pula, tidak tertutup kemungkinan para peserta acara akan memilih persyaratan atau persyaratan tertentu

yang sesuai dengan pandangan pribadinya untuk mengurangi efek peredam dari kebijakan tertentu.

## 2. Struktur birokrasi

Salah satu faktor dalam implementasi kebijakan adalah birokrasi. Untuk menjawab persoalan-persoalan sosial kehidupan modern, birokrasi baik secara sengaja maupun naluriah memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan bersama yang kadang-kadang sengaja dikonstruksi untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tertentu.

Prosedur operasi standar (SOP) dan fragmen adalah dua ciri utama sebuah birokrasi, menurut Edward III. SOP dibuat sebagai reaksi internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana sehingga kebutuhan akan keseragaman dalam pekerjaan organisasi yang rumit dan luas.

SOP dapat mencegah penerapan aturan baru yang menuntut jenis staf yang berbeda atau cara kerja yang baru. SOP lebih menghambat implementasi kebijakan ketika memerlukan perubahan signifikan pada prosedur operasi standar organisasi. SOP juga memiliki manfaat memungkinkan bisnis untuk lebih mudah menyesuaikan diri dengan tugas baru daripada birokrasi tanpa prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sesuai dengan program potensial.

Berdasarkan UU No.25/2005 tentang SPPN, dikenal empat proses teknokratik Perencanaan yang dilakukan oleh perencana pendekatan dalam proses perencanaan, yaitu :

1. Sistem politik Karena pemilih mendasarkan keputusannya pada usulan pembangunan yang diajukan oleh masing-masing calon presiden atau daerah, pemilihan presiden atau kepala daerah dipandang sebagai proses perencanaan.
2. Profesional, lembaga, dan organisasi yang melaksanakan perencanaan pada tingkat praktis menggunakan kerangka kerja dan prosedur ilmiah.
3. Pemangku kepentingan dalam pembangunan diikutsertakan dalam proses perencanaan partisipatif, khususnya melalui penerapan musrenbang.

Wajib mengikutsertakan kelembagaan masyarakat Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemerintah Desa, dalam menyusun konsep perencanaan pembangunan berdasarkan faktor-faktor berikut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa :

1. Partisipatif mengacu pada keterlibatan dan keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Keterlibatan tersebut dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pertemuan, penyampaian pendapat, kehadiran dalam pertemuan, keterlibatan dalam kegiatan yang mendorong gotong royong, dan bantuan materi.
2. Keberpihakan kepada masyarakat, yang memerlukan proses pembangunan yang memberikan manfaat dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat desa

sesuai dengan ambisi dan kebutuhan ekonominya, khususnya masyarakat miskin desa.

3. Terbuka, seperti proses produk perencanaan pembangunan yang transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui atau mengamatinya, baik dari RPJM Desa, pertumbuhan fisik Desa, maupun jumlah kas yang masuk.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui.

Desa merupakan representasi kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh seiring dengan sejarah bangsa Indonesia dan merupakan bagian integral dari kehidupan bangsa Indonesia, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017: 1).

Sebaliknya, desa dalam pandangan Wianrtuti merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh komponen-komponen sistem fisiografis, sosial, politik, dan ekonomi serta budaya lokal dalam interaksi dan pengaruh timbal baliknya dengan tempat lain. Dalam buku Akuntansi Kecamatan dan Desa (2015:6), Sutarjo Kartohadikusumo menyatakan bahwa desa adalah badan hukum tempat suatu masyarakat bertempat tinggal dan berwenang membentuk rumahnya sendiri, yaitu pemerintahan di bawah camat.

Dalam penelitian ini, ada 8 (delapan) informan diantaranya Sekretaris Desa, ketua BPD, Kepala Dusun 3 orang, Anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Komunikasi

proses pelaksanaan perencanaan partisipatif pembangunan partisipatif di desa piring tapiko dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat dan melakukan musawara dusun sesuai dengan prosedur proses penyampaian informasi.

bahwa tujuan umum untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui seperti apa proses pelaksanaan partisipatif pembangunan dan secara rinci masyarakat dapat memahami sepenuhnya seperti apa pelaksanaannya yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Tapiko menyarankan untuk mengadakan diskusi di tingkat dusun dan di setiap kelompok masyarakat ketika melakukan perencanaan pembangunan. Ini bertujuan untuk menyelidiki dan memperdebatkan masalah yang dihadapi lingkungan dan mendidik semua orang tentang

cara bekerja sama untuk menemukan jawaban bagi pertumbuhan desa.

b. Sumber daya

Kemampuan sumber daya manusia untuk menjalankan kebijakan tertentu disebut sebagai otoritas dalam sumber daya. Kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya manusia merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap pelaksana untuk menjalankan syarat-syarat suatu kebijakan.

c. Dari segi sumber daya kajian telah memenuhi kebutuhan masyarakat yang saat ini menjadi fokus utama pembangunan desa di bidang lingkungan dan infrastruktur. Meski begitu, itu berdasarkan usulan dari masyarakat itu sendiri, dan alhamdulillah sebagian, jika tidak seluruhnya, terealisasi.

d. Disposisi

Menurut (Winarno,2004:142) jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit.

Berdasarkan hasil wawancara pada informan ketua BPD dan anggota BPD mengenai sikap pelaksanaan partisipatif pembangunan tersebut pada umumnya program tersebut sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal atau kurang berjalan dengan baik

e. Struktur birokrasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa proses yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatur dalam bentuk prosedur pelaksanaan ini mengacuh bagi seluruh pelaksana kebijakan dilapangan dalam hal para pekerja lapangan ,terkadang tahap-tahap tersebut terlalu membingungkan dan perlu diikuti sesuai petunjuk pelaksana yang manjenuhkan masyarakat dan dapat menghambat pelaksana suatu program.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menark kesimpulan bahwa:

Proses perencanaan pembangunan desa telah dilakukan oleh pemerintah desa piriang tapiko serta masyarakat dalam hal ini sebagai peserta. Pengumpulan informasi dari peserta yang menghadiri mesrembang desa telah mencakup mengenai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Pelaksanaan kegiatan

musrembang kegiatan musrembang sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pembangunan desa telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan untuk beberapa dusun karena pemerintah lebih memprioritaskan perbaikan jalan rabat beton antar dusun ke dusun dan pembuangan air dan itu pun belum maksimal.

Penulis menyimpulkan bahwa perencanaan partisipatif pembangunan yang dilakukan Piriang Tapiko Masi belum seefektif perencanaan partisipatif yang sejati. Masih terdapat komponen politik dalam keputusan yang diambil pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, artinya masih ada dusun yang dapat dikatakan kurang mendapat perhatian atau dusun yang mendapat perhatian tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan pemerintah untuk membangun desanya. Hal ini ditunjukkan dengan proses perencanaan pembangunan yang telah menunjukkan proses partisipatif, namun hasil dari proses perencanaan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arianto. 2011. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pulo dongon kecamatan kualuh hulu kabupaten labuhan batu utara.
- Hakim, Abdul. 2013. Implementasi Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Leppaeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Makassar
- Mukhlis Hannan. 2017. Analisis Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif di kabupaten polewali mandar
- Hendryk.2013.Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan sugai keledeng kecamatan samarendah seberang kota samarinda
- Nurfattimah, Rahman, Siti.2016.Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa”, Makassar
- Edward, George III. 1980. Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Lukman Offset
- Winarno. 2014. Kebijakan Public Teori, Proses dan studi kasus. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Winartuti, W. 2021. *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah SMK/MAK Kelas XI*. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Budi Winarno, 2004. *Globalisasi, wujud imperalisme baru: peran negara dalam pembangunan*. Tajdu Press. Universitas Michigan
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa

Undang-Undang Nomor 25/2005 tentang SPPN,

Undang-Undang No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa